

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan globalisasi mendorong lahirnya diplomasi publik sebagai pendekatan yang lebih terbuka dan berorientasi pada masyarakat internasional dalam upaya membangun interaksi langsung guna menyampaikan kepentingan nasional, kebijakan, nilai, serta identitas budaya suatu negara (J. Wang, 2006). Perkembangan ini tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya interkoneksi global yang didorong oleh perkembangan teknologi informasi, mobilitas manusia, serta intensifikasi pertukaran budaya lintas negara (Pane, 2025). Kondisi tersebut tidak hanya mengubah cara negara berkomunikasi dengan publik internasional, tetapi juga memengaruhi struktur aktor yang terlibat dalam diplomasi publik. Pada praktik awalnya, diplomasi publik tidak terlepas dari paradigma yang berorientasi pada negara (*state-centric*), dimana negara diposisikan sebagai aktor utama dalam mengelola komunikasi lintas batas guna memperkuat posisi dan pengaruhnya dalam sistem internasional (Saliu, 2020)

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas hubungan internasional, pendekatan tersebut mengalami pergeseran. Hocking (2005) menyatakan bahwa diplomasi publik tidak lagi dipahami hanya sebagai proses yang bersifat hierarkis (*top-down*) dan dikendalikan oleh negara, tetapi juga berkembang dalam konteks jaringan kebijakan (*policy networks*) yang melibatkan beragam aktor. Dalam model ini, diplomasi publik berlangsung melalui interaksi multidimensional yang tidak lagi bersifat satu arah, tetapi melibatkan berbagai aktor dalam hubungan yang lebih kompleks (Hocking, 2005). Hocking juga menekankan bahwasannya model hierarkis dan model jaringan tersebut tidak sepenuhnya saling menggantikan, tetapi hadir secara bersamaan dalam praktik diplomasi publik kontemporer. Dalam konteks ini, publik

tidak lagi diposisikan sebagai sasaran komunikasi, tetapi juga sebagai mitra bahkan produsen dalam proses diplomasi (Hocking, 2008).

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa batas antara aktor domestik dan internasional menjadi semakin kabur, sehingga negara tidak lagi menjadi satu-satunya sumber otoritas dalam membentuk persepsi global. Kondisi ini menuntut negara untuk beradaptasi dengan pola interaksi yang lebih terbuka dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di luar struktur formal pemerintahan (Salam et al., 2017). Pergeseran ini juga mencerminkan perubahan dalam cara kekuasaan dijalankan dalam diplomasi publik, dimana efektivitas tidak lagi hanya ditentukan oleh kapasitas negara, tetapi juga oleh kemampuan membangun relasi dan keterhubungan antar aktor (Lee & Ayhan, 2015).

Perkembangan diplomasi publik yang berbasis relasi dan jaringan turut mendorong berbagai negara untuk mengembangkan pendekatan yang lebih kolaboratif dalam membangun hubungan dengan publik internasional. Dalam hal ini, budaya dan industri kreatif menjadi salah satu instrumen yang sering digunakan dalam praktik diplomasi publik kontemporer yang tidak hanya sebagai sarana promosi budaya, tetapi juga sebagai medium untuk membangun keterhubungan, pertukaran pengetahuan, serta kerja sama lintas negara (Hilwa Amalia, 2023). Negara-negara di Asia menjadi contoh bagaimana negara memanfaatkan industri kreatif sebagai bagian dari strategi diplomasi publik modern mereka. Salah satu negara yang aktif mengembangkan pendekatan tersebut adalah Korea Selatan, khususnya melalui pemanfaatan industri konten dan kerja sama budaya sebagai bagian dari praktik diplomasi publiknya.

Dalam beberapa dekade terakhir, Korea Selatan secara konsisten telah memanfaatkan sektor budaya dan industri kreatif, khususnya melalui pengembangan sektor musik, film animasi, media digital, dan berbagai produk budaya populer lainnya. Praktik tersebut terlihat melalui fenomena *Korean Wave* atau *Hallyu* yang merujuk pada pesatnya pertumbuhan industri budaya Korea Selatan serta penyebaran produk budaya seperti program televisi, film, musik, dan permainan digital ke berbagai negara sejak akhir 1990an (McLaren & Jin, 2020). Fenomena ini tidak hanya memberikan

keuntungan ekonomi bagi industri hiburan Korea Selatan, tetapi juga berkontribusi dalam membangun citra Korea Selatan sebagai negara modern yang tetap mempertahankan identitas budayanya (Wang & Braw, 2005). Dalam konteks diplomasi publik, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa budaya tidak lagi diposisikan hanya sebagai instrumen promosi budaya, tetapi juga sebagai medium kerja sama budaya dan pengembangan hubungan internasional.

Orientasi tersebut tercermin melalui berbagai bentuk kerja sama budaya, pelatihan profesional, pengembangan kapasitas industri kreatif, serta pertukaran pengetahuan dengan berbagai negara (Joisangadji & Rasyidah, 2021). Hal tersebut juga terlihat dalam arah kebijakan diplomasi publik Korea Selatan di tingkat makro. Berdasarkan dokumen *Public Diplomacy of the Republic of Korea* yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, diplomasi publik Korea Selatan tidak hanya diarahkan pada promosi citra negara, tetapi juga menekankan pentingnya *interactive cultural diplomacy*, penguatan *public-private partnerships*, serta pengembangan profesional generasi muda dalam diplomasi publik. Selain itu, Korea Selatan juga menempatkan budaya, teknologi, dan inovasi sebagai bagian penting dalam membangun hubungan internasional dan memperluas kerja sama global (Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea, n.d.). Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa diplomasi publik Korea Selatan berkembang tidak hanya melalui komunikasi formal negara, tetapi juga melalui keterlibatan berbagai aktor dan pembentukan jaringan kolaboratif lintas negara.

Dalam implementasinya, praktik diplomasi publik Korea Selatan juga melibatkan berbagai institusi pendukung di luar Kementerian Luar Negeri yang memiliki otoritas teknis dalam sektor budaya dan industri kreatif. Dalam hal ini, Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan berperan sebagai institusi negara yang mendorong pengembangan budaya dan industri konten sebagai bagian dari kerja sama internasional. Selain itu, terdapat Korea Creative Content Agency (KOCCA) yang berperan dalam mendukung implementasi kebijakan pengembangan industri kreatif melalui berbagai program pelatihan, fasilitas industri

kreatif, dan kerja sama budaya internasional (Suryani & Nasution, 2023). Melalui berbagai program tersebut, KOCCA tidak hanya menjalankan fungsi promosi budaya, tetapi juga mendukung pengembangan ekosistem industri kreatif dan keterhubungan antar aktor dalam kerja sama lintas negara. Hal ini menunjukkan bahwa praktik diplomasi publik Korea Selatan dijalankan melalui pendekatan yang berbasis jaringan (*networked*), dimana negara bekerja melalui kolaborasi dengan berbagai aktor dan institusi dalam menjangkau publik internasional.

Pendekatan diplomasi publik berbasis jaringan tersebut dapat dilihat dalam program House of Indonesian (HOI). Program ini merupakan program budaya yang melibatkan Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata (MCST) Korea Selatan dan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia (Mardiansyah, 2025). Program kerja sama ini dilaksanakan selama lima tahun, mulai dari tahun 2023 hingga 2027 (Basuki, 2024). Berdasarkan pernyataan resmi Wakil Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Park Soo-deok menjelaskan bahwa program House of Indonesian ini didukung melalui skema *Official Development Assistance* (ODA) Korea Selatan (Waspada.id, 2025).

Program ini dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat kapasitas industri kreatif Indonesia melalui pengembangan talenta muda, khususnya pelatihan intensif di bidang animasi, film dokumenter, *mobile content*, serta konten pendidikan seni budaya agar mampu bersaing secara global sekaligus melestarikan budaya lokal Nusantara (Astuti, 2025). Dalam implementasinya, program HOI diwujudkan melalui berbagai bentuk kegiatan utama, seperti penyelenggaraan program pelatihan berjenjang, kegiatan produksi karya (*content production*) yang menghasilkan *output* nyata seperti film animasi dan dokumenter berbasis budaya Indonesia, pendampingan dan mentoring selama proses produksi untuk memastikan kualitas karya sesuai standar industri, serta penyelenggaraan *showcase* seperti HOI Week yang berfungsi sebagai ruang apresiasi, promosi karya, sekaligus memperkuat jejaring industri kreatif (Hariyanto, 2025).

Selain itu, program ini juga melibatkan berbagai aktor, tidak hanya dari unsur negara seperti Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian

Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata (MCST) Korea Selatan, tetapi juga melibatkan lembaga pelaksana seperti Korea Creative Content Agency (KOCCA) Indonesia sebagai perpanjangan institusi negara Korea Selatan yang berperan dalam fasilitasi pelatihan dan pendampingan teknis, serta aktor non negara seperti studio animasi dan pelaku industri kreatif yang berasal dari Indonesia dan Korea Selatan yang terlibat sebagai mentor, serta para peserta yang memiliki ketertarikan atau sudah aktif di bidang industri kreatif (Hariyanto, 2025).

Keterlibatan multi-aktor tersebut menunjukkan bahwa program ini tidak hanya berlangsung dalam kerangka hubungan antar pemerintah, tetapi juga mencerminkan praktik diplomasi publik yang semakin berbasis jaringan dan relasional. Keterlibatan aktor non negara dalam program ini juga menunjukkan bahwa mereka tidak hanya berperan sebagai penerima, tetapi turut terlibat secara aktif dalam proses produksi konten melalui interaksi langsung antar pelaku industri kreatif. Melalui mekanisme pelatihan, kolaborasi produksi, serta pengembangan jaringan kreatif, program HOI membentuk ruang interaksi lintas aktor dalam suatu kerangka kerja sama yang lebih partisipatif. Pendekatan *co-production* dalam program ini juga menunjukkan bahwa peserta turut berperan dalam proses penciptaan karya secara bersama.

Namun, keterlibatan multi-aktor dalam program berbasis jaringan tersebut tidak selalu menunjukkan relasi yang sepenuhnya setara antar pihak yang terlibat. Di satu sisi, program HOI menampilkan karakter diplomasi publik yang partisipatif melalui keterlibatan berbagai aktor non negara dalam implementasi program. Akan tetapi di sisi lain, implementasi program tetap berjalan dalam kerangka institusional dan mekanisme formal yang telah ditetapkan sebelumnya melalui skema ODA dan struktur koordinasi program yang dijalankan oleh institusi negara (KOCCA, 2024). Dalam praktiknya, relasi antar aktor tetap dapat dipengaruhi oleh perbedaan akses terhadap sumber daya, kapasitas teknis, serta posisi dalam pengambilan keputusan berpotensi membentuk distribusi peran dan kontrol yang tidak merata (Lee & Ayhan, 2015). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa diplomasi publik berbasis jaringan tidak selalu berlangsung secara horizontal, tetapi tetap dapat memperlihatkan adanya distribusi

peran, pembagian kontrol, dan posisi aktor yang berbeda dalam proses implementasinya.

Hal ini menjadi penting karena dalam kajian diplomasi publik kontemporer, penelitian mengenai diplomasi publik masih banyak berfokus pada aspek komunikasi, citra, *soft power*, dan pengaruh *Korean Wave* dalam membangun persepsi global. Sementara itu, kajian yang secara spesifik membahas bagaimana diplomasi publik dijalankan melalui jaringan implementasi multi-aktor, pembagian peran antar aktor, serta mekanisme koordinasi masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks kerja sama budaya Korea Selatan di Indonesia. Selain itu, studi mengenai program House of Indonesiana (HOI) sendiri sejauh ini masih didominasi oleh laporan institusional, siaran pers, dan pemberitaan media yang umumnya bersifat deskriptif serta lebih menekankan capaian program secara normatif.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika relasi antar aktor dalam program House of Indonesiana (HOI), serta mengkaji bagaimana posisi aktor, pola relasi, dan distribusi peran antar aktor membentuk implementasi diplomasi publik Korea Selatan di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian diplomasi publik kontemporer, khususnya dalam memahami kompleksitas relasi dalam pendekatan kolaboratif, serta menjadi referensi bagi para pengambil kebijakan dalam merancang strategi diplomasi publik yang lebih adaptif.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penelitian ini memunculkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana posisi dan keterhubungan antar aktor dalam jaringan diplomasi publik pada program House of Indonesiana (HOI)?
2. Bagaimana pola relasi dan interaksi antar aktor dalam implementasi program House of Indonesiana (HOI)?

3. Bagaimana pembagian peran dan distribusi kontrol antar aktor membentuk pola kolaborasi dalam program House of Indonesiana (HOI)?

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki ruang lingkup kajian yang dibatasi untuk memastikan fokus analisis tetap terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini difokuskan pada periode tahun 2023-2025. Objek penelitian diarahkan pada program House of Indonesiana (HOI) sebagai bagian dari praktik diplomasi publik Korea Selatan di Indonesia yang dijalankan melalui kerja sama budaya dan pengembangan industri kreatif.

Penelitian ini secara khusus menganalisis dinamika relasi dan posisi antar aktor dalam pelaksanaan program House of Indonesiana (HOI) yang melibatkan aktor negara, pelaku industri kreatif Indonesia dan Korea Selatan sebagai mentor, serta pelaku industri kreatif Indonesia sebagai peserta sekaligus pihak yang terlibat dalam proses produksi bersama (*co-production*).

Analisis difokuskan pada bagaimana distribusi dan kontrol antar aktor terbentuk dalam proses kerja sama tersebut, serta bagaimana relasi yang terjalin mencerminkan praktik diplomasi publik Korea Selatan yang berbasis relasi dan kolaborasi. Penelitian ini tidak membahas aspek narasi, pesan, dan strategi komunikasi dalam diplomasi publik, serta tidak mengukur dampak diplomasi publik terhadap massa publik secara luas, tetapi berfokus pada dinamika relasi antar aktor dan publik target yang terlibat langsung dalam program.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis posisi dan keterhubungan antar aktor dalam jaringan diplomasi publik pada program House of Indonesiana (HOI)

2. Untuk menganalisis pola relasi dan interaksi antar aktor dalam pelaksanaan program House of Indonesian (HOI) sebagai praktik diplomasi publik Korea Selatan berbasis jaringan
3. Untuk menganalisis pembagian peran dan distribusi kontrol antar aktor dalam program House of Indonesian (HOI) dalam membentuk sifat kolaborasinya

1.4.2 Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hubungan internasional, khususnya dalam studi diplomasi publik kontemporer yang bersifat relasional, berbasis jaringan, dan kolaboratif. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai dinamika relasi antar aktor serta distribusi peran dan kontrol dalam praktik diplomasi publik berbasis jaringan dan multi-aktor.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai dinamika relasi dan kolaborasi dalam program kerja sama lintas negara, khususnya dalam konteks House of Indonesian (HOI). Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi pemerintah, lembaga pelaksana, serta aktor non negara dalam merancang dan mengelola program diplomasi publik yang melibatkan berbagai aktor secara lebih efektif dan kontekstual.

1.5 Kerangka Teoritis-Konseptual

Dalam hubungan internasional kontemporer, diplomasi publik sering dikaitkan dengan konsep *soft power*, yakni kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi pihak lain melalui daya tarik budaya, nilai, dan kebijakan dibandingkan penggunaan paksaan (*coercion*) (Nye, 2004) Diplomasi publik dipahami sebagai upaya negara dalam menjangkau dan berinteraksi dengan publik internasional untuk menyampaikan kepentingan nasional, nilai, serta identitas budaya melalui komunikasi lintas batas (J. Wang, 2006). Berbeda halnya dengan diplomasi tradisional yang berfokus pada hubungan antar pemerintah, diplomasi publik melibatkan keterlibatan langsung dengan

masyarakat negara lain. Diplomasi publik merupakan konsep yang terus berkembang dan tidak memiliki batasan definisi yang sepenuhnya disepakati karena dapat dipahami dari berbagai aspek seperti tujuan, strategi, atau aktor yang terlibat (Zatepilina, 2009). Dalam perkembangannya, diplomasi publik tidak lagi terbatas pada proses komunikasi satu arah yang bersifat persuasif, tetapi juga termasuk upaya membangun hubungan yang memungkinkan adanya pertukaran pemahaman dan keterlibatan antara negara dan publik internasional (Leonard et al., 2002).

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas hubungan internasional, praktik diplomasi publik mengalami pergeseran dari pendekatan yang berorientasi pada negara (*state centric*) menuju pendekatan yang lebih terbuka menjadi proses dua arah yang melibatkan dialog antara negara dan publik internasional (Melissen, 2005). Selain itu, (Zaharna et al., 2014) melalui konsep *connective mindshift* menjelaskan bahwa diplomasi publik kontemporer tidak lagi hanya dipahami sebagai proses penyampaian pesan secara satu arah, tetapi sebagai proses membangun hubungan, konektivitas, dan kolaborasi antar aktor dalam masyarakat jaringan (*network society*).

Dalam pendekatan ini, unit analisis diplomasi publik bergeser dari yang berorientasi pada pesan (*message-centered diplomacy*) menuju relasi dan jaringan antar aktor. Meskipun demikian, pendekatan ini tidak sepenuhnya menghilangkan keberadaan pesan dalam diplomasi publik, tetapi menempatkan pesan sebagai bagian dari proses relasional dan keterlibatan antar aktor dalam jaringan kolaboratif. Efektivitas diplomasi publik tidak hanya ditentukan oleh kemampuan negara menyampaikan pesan, tetapi juga oleh kemampuan membangun keterhubungan, partisipasi, dan kolaborasi dalam jaringan global (Zaharna et al., 2014). Melalui pergeseran ini, publik tidak lagi sekedar target, tetapi juga berperan sebagai mitra dan "*producers*" dari proses diplomatik itu sendiri (Hocking, 2005)

Brian Hocking (2005) juga menjelaskan bahwa diplomasi publik berkembang dalam konteks *policy networks* yang melibatkan berbagai aktor lintas batas. Model jaringan ini menekankan pentingnya jaringan kebijakan dalam merespon dinamika hubungan internasional yang semakin kompleks, melalui komunikasi, dialog, dan

kepercayaan antar berbagai pemangku kepentingan. Namun, kerangka Hocking lebih menekankan pada perubahan struktur dan konfigurasi aktor dalam diplomasi publik, sehingga belum secara spesifik menjelaskan bagaimana relasi antar aktor tersebut bekerja dalam praktik kolaborasi. Dalam konteks ini, Ayhan dan Lee (2015) mengembangkan kerangka *Relational, Networked and Collaborative Public Diplomacy* yang merupakan pengembangan dari berbagai literatur diplomasi publik kontemporer, khususnya yang menekankan pentingnya relasi, jaringan, dan kolaborasi antar aktor. Kerangka ini memandang bahwa aktor non negara tidak lagi sekedar penerima, tetapi turut berperan sebagai pelaku aktif dalam proses diplomasi, sehingga peran antar aktor terbentuk dalam praktik diplomasi publik.

Berikut tiga dimensi diplomasi publik menurut Ayhan dan Lee (2015):

1. Dimensi Relasional (*Relational*), merujuk pada pendekatan yang menempatkan *relationship-building* sebagai inti dari praktik diplomasi. Dimensi ini menekankan pentingnya interaksi jangka panjang (*long-term relationship-building*) yang didasarkan pada kepercayaan (*trust*), komunikasi dialogis, *mutual understanding*, dan keterlibatan aktif antar aktor. Ayhan mengutip pernyataan Leonard (2002) yang menyatakan bahwa diplomasi publik yang berkelanjutan berada pada kerangka *relationship-building*, yaitu upaya membangun hubungan jangka panjang dengan individu maupun kelompok. Dalam konteks ini, publik tidak lagi diposisikan sebagai target komunikasi, tetapi sebagai *stakeholders* (pemangku kepentingan) dan partisipan aktif dalam proses diplomasi. Oleh karena itu, keberhasilan diplomasi publik tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menyampaikan pesan, tetapi juga oleh kualitas hubungan yang dibangun dan dipelihara secara berkelanjutan melalui *continuous engagement*. Hubungan sosial dalam diplomasi publik dipandang memerlukan perhatian dan interaksi yang terus menerus karena relasi antar aktor tidak bersifat mekanis, melainkan berkembang melalui proses komunikasi dan pengalaman sosial yang berkelanjutan.

Dalam dimensi ini, aktor non negara memiliki posisi penting karena dianggap memiliki *credibility, trustworthiness, goodwill*, serta *local knowledge* yang lebih dekat

dengan publik dibandingkan institusi negara yang sering menghadapi skeptisisme publik. Ayhan & Lee menjelaskan bahwa aktor non negara cenderung lebih mudah membangun *behavioral relationships* melalui keterlibatan langsung di lapangan, dibandingkan hubungan simbolik yang dimediasi institusi negara. Selain itu, aktor non negara juga dipandang lebih fleksibel dalam membangun hubungan interpersonal jangka panjang karena memiliki kedekatan sosial dan pengalaman langsung dengan masyarakat lokal.

Ayhan & Lee juga mengutip Fitzpatrick (2007) yang menyebutkan bahwa tujuan utama diplomasi publik kontemporer adalah *relationship management*, yaitu pengelolaan hubungan yang dibangun melalui *genuine dialogue* dan *two-way symmetrical communication*. Dalam model komunikasi ini, interaksi tidak hanya berlangsung dua arah, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan masing-masing pihak sehingga memungkinkan terciptanya *mutual benefit* dan *mutual understanding*. Grunig dan Hunt (1984) menegaskan bahwa komunikasi yang efektif tidak hanya melibatkan pertukaran informasi, tetapi juga kemampuan untuk mendengarkan, mengakomodasi kepentingan publik, dan membangun hubungan yang bersifat timbal balik.

Dengan demikian, dimensi relasional menekankan bahwa keberhasilan diplomasi publik tidak hanya bergantung pada siapa yang menyampaikan pesan, tetapi pada bagaimana hubungan antar aktor dibangun, dipelihara, dan dikembangkan dalam jangka panjang melalui komunikasi, kepercayaan, dan keterlibatan yang berkelanjutan. Dalam penelitian ini, dimensi relasional digunakan untuk melihat bagaimana hubungan antar aktor dalam program House of Indonesian (HOI) dibangun melalui komunikasi dua arah, keterlibatan aktif, dan proses *relationship-building* dalam implementasi diplomasi publik Korea Selatan di Indonesia.

2. Dimensi Jaringan (*Networked*), dimensi ini memandang bahwa diplomasi publik kontemporer berlangsung dalam suatu *complex network environment*, yaitu lingkungan yang semakin terhubung melalui jaringan global dan melibatkan berbagai aktor negara maupun non negara. Ayhan dan Lee menjelaskan bahwa dalam konteks

tersebut negara tetap menjadi aktor penting, tetapi tidak lagi menjadi satu-satunya aktor yang menentukan efektivitas diplomasi publik, terutama dalam praktik diplomasi publik jangka panjang. Negara diposisikan sebagai salah satu *stakeholders* dalam jaringan yang saling terhubung dengan aktor lain seperti organisasi non negara, komunitas, pelaku industri, diaspora, maupun publik. Dalam dimensi ini, publik dan aktor non negara tidak lagi dipandang sebagai *passive audiences*, tetapi sebagai *stakeholders* yang memiliki kepentingan, pengaruh, serta kapasitas untuk mendukung, menolak, atau memengaruhi arah suatu inisiatif diplomasi publik. Oleh karena itu, efektivitas diplomasi publik tidak hanya ditentukan oleh kemampuan negara dalam menyampaikan pesan, tetapi juga oleh bagaimana hubungan antar aktor dibangun dan bagaimana jaringan tersebut dikelola. Ayhan & Lee menegaskan bahwa keterlibatan *stakeholders* serta pembukaan ruang kolaborasi penting untuk mengurangi risiko alienasi publik dan memperkuat keberlanjutan diplomasi publik dalam lingkungan jaringan.

Dalam *networked public diplomacy*, terdapat dua aspek penting yang menentukan dinamika jaringan, yaitu *network density* dan *centrality* aktor dalam jaringan. *Network density* merujuk pada tingkat keterhubungan dan intensitas interaksi antar aktor dalam jaringan. Jaringan yang padat (*dense network*) memungkinkan komunikasi berlangsung lebih efisien serta mendorong terbentuknya *shared behavioral expectations*, norma bersama, dan *social capital* antar aktor. Tingginya *network density* juga meningkatkan peluang kolaborasi karena hubungan antar aktor dibangun melalui komunikasi berkelanjutan, pertukaran informasi, dan koordinasi yang terus menerus. Sementara itu, *centrality* merujuk pada posisi strategis aktor dalam jaringan yang menentukan sejauh mana aktor memiliki akses terhadap informasi, kemampuan menjangkau aktor lain, serta potensi mengontrol arus komunikasi dalam jaringan. Ayhan & Lee mengadopsi konsep Freeman yang membagi *centrality* menjadi beberapa bentuk, seperti *degree centrality*, *closeness centrality*, dan *betweenness centrality*. Aktor dengan *centrality* tinggi memiliki posisi penting sebagai *gatekeeper* atau *broker*

yang menghubungkan bagian-bagian jaringan tertentu dan mengatur pertukaran informasi antar aktor.

Dalam praktik diplomasi publik, negara tidak selalu memiliki akses, kredibilitas, maupun jangkauan yang kuat pada seluruh bagian jaringan. Ayhan dan Lee menjelaskan bahwa terdapat bagian jaringan tertentu yang sulit dijangkau negara atau disebut sebagai *dark areas in a network*. Dalam kondisi tersebut, aktor non-negara sering kali memiliki posisi yang lebih sentral karena memiliki *credibility*, *social capital*, *local knowledge*, dan konektivitas sosial yang lebih kuat dengan publik lokal. Oleh karena itu, aktor non negara dapat berfungsi sebagai *network bridge* atau *broker* yang membantu negara menjangkau bagian jaringan yang sulit diakses secara langsung. Selain itu, aktor non negara juga memiliki keunggulan berupa *specialized expertise* dan fleksibilitas operasional yang memungkinkan implementasi diplomasi publik berjalan lebih efektif dan adaptif. Dalam konteks ini, negara dapat bertindak sebagai *network weaver*, yaitu aktor yang menghubungkan berbagai kelompok dan membangun hubungan antar aktor dalam jaringan diplomasi publik. Dengan demikian, dimensi jaringan menekankan bahwa diplomasi publik kontemporer tidak lagi dijalankan secara terpusat oleh negara, tetapi melalui pengelolaan jaringan multi-aktor yang saling terhubung dalam proses komunikasi, kolaborasi, dan pertukaran sumber daya. Dalam penelitian ini, dimensi *networked public diplomacy* digunakan untuk menganalisis posisi, keterhubungan, dan peran masing-masing aktor dalam struktur jaringan program House of Indonesian (HOI), termasuk aktor yang memiliki posisi sentral dalam proses implementasi diplomasi publik Korea Selatan di Indonesia.

3. Dimensi Kolaboratif (*Collaborative*), menekankan bagaimana interaksi antara negara dan aktor non negara seharusnya berlangsung dalam praktik kerja sama. Dalam konteks ini, kolaborasi tidak hanya dipahami sebagai keterlibatan berbagai aktor, tetapi juga sebagai proses yang mencerminkan pembagian peran, kepentingan, serta kontrol aktor yang terlibat. Ayhan & Lee (2015) mengembangkan tipologi kolaborasi yang didasarkan pada dua pertanyaan utama, yakni "siapa yang mengusulkan

kolaborasi" dan "kepentingan siapa yang lebih diprioritaskan dalam program tersebut". Dari dua pertanyaan tersebut, muncul empat tipe kolaborasi yang mungkin terjadi:

- *Active contractor*, negara secara aktif mencari aktor non negara untuk melaksanakan program yang agenda dan tujuan sepenuhnya ditentukan oleh negara.
- *Passive contractor*, negara membuka pendaftaran dan menunggu aktor non negara yang ingin terlibat sebagai pelaksana dengan agenda yang tetap ditentukan oleh negara.
- *Active collaboration*, negara secara proaktif mengajak aktor non negara untuk bekerja sama, namun dengan tetap menghormati tujuan dan agenda dibawa aktor non negara tersebut.
- *Passive collaboration*, negara membuka ruang bagi aktor non negara yang ingin mengajukan kerja sama berdasarkan inisiatif mereka sendiri.

Tipologi ini menunjukkan bahwa kolaborasi dalam diplomasi publik tidak selalu berlangsung dalam relasi yang setara, tetapi dapat berbagai bentuk yang lebih hierarkis hingga lebih partisipatif. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dimensi kolaboratif digunakan untuk menganalisis bagaimana bentuk kolaborasi dalam program HOI berlangsung, serta untuk mengidentifikasi distribusi peran dan kontrol antar aktor dalam program tersebut, termasuk melihat kecenderungan apakah relasi yang terbentuk bersifat lebih dominan, terdistribusi, atau mendekati setara.

1.6 Asumsi Penelitian

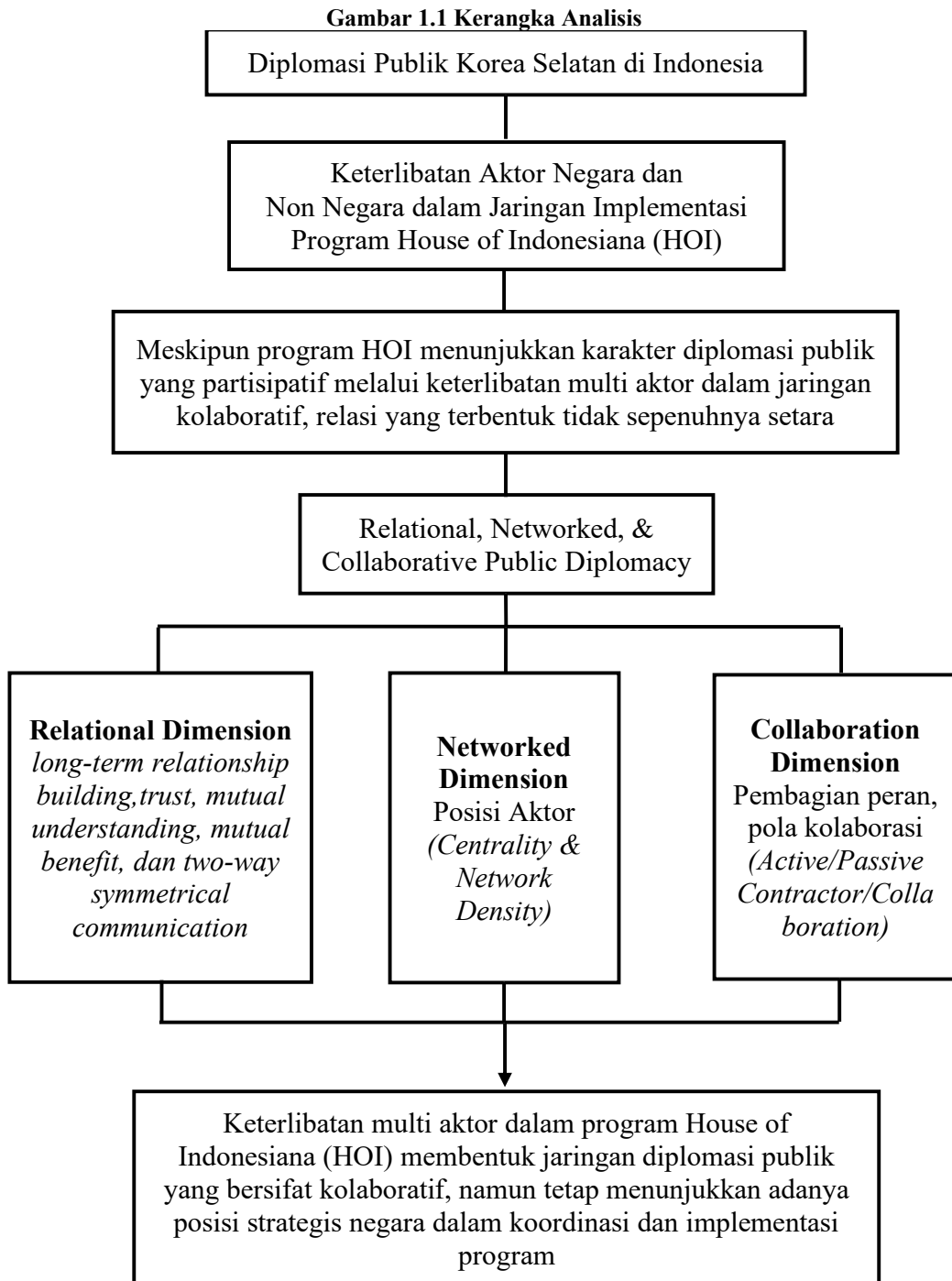
Penelitian ini didasarkan pada beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Sebagai program yang dapat dipahami sebagai bagian dari praktik diplomasi publik Korea Selatan yang berbasis jaringan, implementasi program *House of Indonesian* (HOI) diduga melibatkan berbagai aktor negara dan non negara yang memiliki posisi dan tingkat keterhubungan yang berbeda dalam jaringan. Aktor yang terhubung langsung dengan pembentukan kebijakan dan

pengelolaan program diperkirakan menempati posisi yang lebih sentral dibandingkan aktor lain yang berperan pada tingkat implementasi operasional.

2. Relasi dan interaksi antar aktor dalam program House of Indonesian (HOI) diduga berlangsung melalui komunikasi, koordinasi dan bentuk keterlibatan yang memungkinkan terjadinya pertukaran serta kolaborasi antar pihak yang terlibat. Namun, interaksi tersebut diperkirakan tetap berlangsung dalam kerangka program yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga ruang partisipasi dan negosiasi antar aktor berada dalam batas tertentu.
3. Kolaborasi dalam program House of Indonesian (HOI) diduga tidak sepenuhnya menunjukkan distribusi peran dan kontrol yang setara antar aktor. Aktor institusional yang terlibat dalam perancangan dan pengelolaan program memiliki kapasitas yang lebih besar dalam menentukan arah strategis dan pengambilan keputusan, sementara aktor non negara cenderung lebih berperan pada aspek implementasi dan pelaksanaan kegiatan.

1.7 Kerangka Analisis



Kerangka analisis ini digunakan untuk menganalisis praktik diplomasi publik Korea Selatan di Indonesia melalui program House of Indonesian (HOI). Dalam penelitian ini, program HOI dipahami sebagai bagian dari implementasi diplomasi publik Korea Selatan yang dijalankan melalui keterlibatan aktor negara dan non negara dalam suatu jaringan implementasi program. Keterlibatan multi-aktor tersebut menunjukkan bahwa diplomasi publik tidak lagi berlangsung melalui komunikasi satu arah yang sepenuhnya dikendalikan negara, tetapi melalui hubungan, interaksi, dan kolaborasi antar berbagai aktor yang saling terhubung. Meskipun program HOI menunjukkan karakter diplomasi publik yang partisipatif melalui keterlibatan berbagai aktor dalam implementasi program, relasi yang terbentuk tidak selalu sepenuhnya setara. Dalam praktiknya, negara tetap memiliki posisi strategis dalam menentukan arah program, koordinasi implementasi, serta pengelolaan kerja sama melalui institusi dan mekanisme formal yang terlibat dalam program HOI. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan kerangka *relational*, *networked*, dan *collaborative public diplomacy* untuk melihat bagaimana relasi antar aktor terbentuk dalam implementasi program.

Melalui dimensi *relational*, penelitian ini menganalisis bagaimana hubungan antar aktor dibangun melalui interaksi jangka panjang, komunikasi dua arah, *trust building*, *mutual understanding*, dan *mutual benefit* dalam pelaksanaan program HOI. Dimensi ini digunakan untuk melihat bagaimana hubungan antar aktor tidak hanya berlangsung secara administratif, tetapi juga berkembang melalui interaksi sosial dan profesional yang berkelanjutan. Kemudian, dimensi *networked* digunakan untuk menganalisis posisi dan keterhubungan antar aktor dalam jaringan implementasi program HOI. Dalam dimensi ini, penelitian berfokus pada posisi strategis aktor dalam jaringan (*centrality*) serta intensitas hubungan dan koordinasi antar aktor (*network density*) dalam implementasi diplomasi publik Korea Selatan di Indonesia. Sementara itu, dimensi *collaborative* digunakan untuk melihat bagaimana pembagian peran, pola kolaborasi, dan distribusi kontrol berlangsung antar aktor dalam implementasi program HOI. Dalam dimensi ini, penelitian juga menganalisis kecenderungan pola kolaborasi

yang terbentuk melalui tipologi kolaboratif, khususnya terkait posisi negara dan aktor non negara dalam implementasi program.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan bahwa keterlibatan multi-aktor dalam program HOI membentuk jaringan diplomasi publik yang bersifat kolaboratif, namun tetap menunjukkan adanya posisi strategis negara dalam koordinasi dan implementasi program. Dengan demikian, kerangka analisis ini digunakan penulis untuk memahami bagaimana relasi, jaringan, dan pembagian peran antar aktor membentuk praktik diplomasi publik Korea Selatan di Indonesia melalui program House of Indonesian (HOI).